



Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMKN 4 Yogyakarta

Linna Haryani ¹, Hasanah Setyowati ²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi : linnaharyani.88@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of accountability and transparency in the management of School Operational Assistance Funds (Dana BOS) at SMKN 4 Yogyakarta. Good management of BOS Funds is very important to support school operational activities and improve the quality of education. This research is motivated by the importance of applying the principles of accountability and transparency in the use of public funds in accordance with applicable provisions and can increase public trust. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The resource persons in this study consisted of the Principal, BOS Treasurer, Head of Administration, and Guardian of Students of SMKN 4 Yogyakarta. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Data quality testing is carried out by source triangulation and technique triangulation. The results of the study show that the accountability mechanism in the management of BOS Funds at SMKN 4 Yogyakarta has been implemented well through the stages of planning, implementation, recording, reporting, and supervision in accordance with applicable technical instructions. Transparency in the management of BOS Funds has also been implemented through the publication of information on the use of funds on bulletin boards and school websites so that the public can access information openly. The level of public trust in the management of the BOS Fund is relatively high because there are no significant complaints. However, there are still obstacles in the form of changes in technical instructions in the middle of the year and delays in the disbursement of BOS funds which have an impact on the implementation of school activities.

Keywords: Accountability, Transparency, BOS Fund.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 4 Yogyakarta. Pengelolaan Dana BOS yang baik sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Kepala Tata Usaha, dan Wali Murid SMKN 4 Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Pengujian kualitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Transparansi pengelolaan Dana BOS juga telah diterapkan melalui publikasi informasi penggunaan dana pada papan pengumuman dan website sekolah sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS tergolong tinggi karena tidak adanya keluhan yang signifikan. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa perubahan petunjuk teknis pada pertengahan tahun dan keterlambatan pencairan dana BOS yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan sekolah.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Dana BOS.

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan adalah proses pematangan hidup dan sarana strategis yang meningkatkan kualitas kehidupan manusia yang diharapkan dapat melahirkan generasi yang mampu memahami hakikat dalam menjalankan kehidupan secara benar (Suriansyah & Aslamiah, 2021). Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang berperan penting dalam kemajuan dan kemunduran suatu bangsa serta dipandang sebagai sarana dan kunci untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa atau negara (Anwar & Salim, 2022). Pada dasarnya pemerintah negara dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar sederajat sebagaimana telah diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa memungut biaya sehingga masyarakat tidak merasa terbebani oleh biaya pendidikan (Pristiwanti et al., 2022).

Pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana pendidikan memiliki peran dalam menentukan kualitas serta keberlangsungan usaha pendidikan (Sari & Nugroho, 2022). Untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar serta pendidikan lain yang sederajat, maka dibutuhkan pendanaan yang cukup besar untuk memaksimalkan dan menunjang proses keberlangsungan kegiatan pendidikan seperti kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, dan kegiatan lainnya (Prasetyo & Munastiwi, 2021). Beberapa sumber biaya pendidikan diantaranya berasal dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Handayani & Kurniawan, 2023). Menurut penelitian terdahulu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan bentuk program bantuan dana dari pemerintah pusat yang diberikan kepada setiap sekolah sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan program wajib belajar 9 tahun dan untuk meringankan beban bagi peserta didik yang kurang mampu (Rustiningrum, 2023). Sedangkan sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota pada sektor pendidikan sebagai sumber utama pembiayaan sekolah yang dikeluarkan

untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya (Yuliana & Hadi, 2022). Pemerintah Indonesia telah berusaha mewujudkan amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan melakukan berbagai program bantuan yang diharapkan mampu membantu keberlangsungan pendidikan di Indonesia (Fauziah & Rahmat, 2021).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional menyikapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah atau dikenal dengan Dana BOS yang pertama kali diselenggarakan bulan Juli tahun 2005 pada tahun ajaran baru. Pemerintah memberikan tanggung jawab kepada lembaga pendidikan untuk mengelola secara mandiri dana bantuan operasional tersebut agar bantuan terealisasi tepat sasaran dan memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didiknya. Selain itu, kenaikan jumlah Dana BOS dari tahun ke tahun diharapkan akan menjadikan program bantuan tersebut sebagai pilar utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan membantu peserta didik yang tidak mampu agar terhindar dari segala bentuk pungutan biaya pendidikan.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Suhardi & Nurhayati, 2021). Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Rahmawati & Supriyanto, 2022).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan (Maulina & Setiawan, 2021). Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait sehingga menimbulkan persepsi bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa, artinya sekolah menyediakan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Kusuma & Hartono, 2022). Jadi pihak-pihak tertentu dapat mengetahui kemana saja dana sekolah dibelanjakan (Lestari & Firmansyah, 2023).

Lembaga satuan pendidikan perlu mengetahui sumber dana yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta harus memperhatikan berbagai ketentuan dari masing-masing sumber dana (Widodo & Ramadhani, 2022). Pada dasarnya penggunaan Dana BOS sekolah harus mengacu terhadap peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Dalam peraturan tersebut diatur tentang penggunaan BOS reguler yang harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Nasional

Pendidikan dan penggunaan BOS Reguler diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah nonpersonalia (Hidayat & Fauzi, 2023).

Dana Bantuan Operasional Sekolah harus dikelola lembaga pendidikan dengan baik dan benar untuk memaksimalkan tercapainya tujuan pendidikan dengan cara melakukan kegiatan pengelolaan atau manajemen khususnya di bidang keuangan. Manajemen yang berbasis sekolah dimulai dengan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penggunaan Dana BOS, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengevaluasian biaya pendidikan yang digunakan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan harus memiliki rencana kerja yang jelas, terperinci, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan semua kegiatan sekolah agar lebih terarah sesuai dengan standar pengelolaan satuan pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa sekolah/madrasah harus membuat rencana kerja jangka menengah berdasarkan hasil dari evaluasi diri sekolah yang dibagi menjadi kegiatan tahunan dalam bentuk rencana kegiatan tahunan. Bersumber dari rencana kerja tahunan tersebut maka sekolah menjabarkan semua kegiatan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran sekolah sampai dengan rincian objek yang harus dibiayai dari Dana BOS.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta merupakan salah satu dari banyaknya sekolah yang menerima Dana BOS pada tahun 2025. Berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), rincian alokasi dana dan calon penerima Dana BOS tahun ajaran 2025 memiliki variasi yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh tingkat indeks kemahalan konstruksi di setiap daerah. Untuk besaran alokasi dana yang diberikan kepada sekolah penerima Dana BOS dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Anggaran Dana BOS yang diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebesar Rp1.670.000/peserta didik. Oleh karena itu, SMKN 4 Yogyakarta menerima Dana BOS dengan jumlah anggaran sebesar Rp3.183.020.000 dari 1.906 siswa yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Anggaran dana tersebut digunakan pihak sekolah untuk Belanja Modal dan Belanja Operasi Sekolah serta pembiayaan-pembiayaan lainnya. Untuk mekanisme penyaluran Dana BOS yang diterima sekolah dibagi menjadi 2 tahap (masing-masing 50%) setiap tahunnya.

Permasalahan dalam pengelolaan Dana BOS yang masih sering ditemukan di lembaga pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta, mengenai kemampuan penyaluran Dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti mengenai pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta, menemukan bahwa sekolah mengelola Dana BOS melalui tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan penggunaan anggaran. Secara keseluruhan sekolah mampu mengelola Dana BOS dengan cukup baik, meskipun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Dana BOS. Dalam pelaksanaan penyaluran, keterlambatan penyaluran dana BOS tahap 2 di SMKN 4 Yogyakarta disebabkan oleh keterlambatan penyaluran dari pusat. Dari sisi manajemen, sekolah secara rutin telah melaksanakan rekonsiliasi dan

pelaporan setiap bulan sesuai ketentuan. Dari sisi pengawasan, mekanisme monitoring dan evaluasi juga telah dilakukan oleh tim manajemen BOS sekolah serta pengawasan dari Inspektorat dan BPK. Adapun kendala yang terjadi lebih kepada faktor internal, yaitu keterlambatan dalam pengumpulan SPJ oleh penanggung jawab kegiatan yang melebihi batas waktu anggaran kas (angkas), sehingga realisasi tidak sesuai dengan perencanaan anggaran kas.

Mengingat begitu pentingnya dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOS, maka diperlukan adanya sistem manajemen yang baik terhadap penggunaan Dana BOS di sekolah. Sistem informasi pelaporan Dana BOS melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) merupakan salah satu sistem yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempermudah sekolah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Dana BOS dalam bentuk digital. Sistem aplikasi ini merupakan sistem yang telah memenuhi kebutuhan dari pengelolaan Dana BOS dan telah disetujui di dalam 3 kementerian sekaligus yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang disingkat dengan aplikasi RKAS merupakan sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Dana BOS di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Aplikasi tersebut membentuk sebuah wadah pencatatan anggaran dimana kegiatan pengelolaan anggaran baik dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah yang semula dilakukan secara manual menjadi governansi digital atau sistematis.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMKN 4 Yogyakarta”

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menghasilkan teori tentang fenomena atau peristiwa, orang, objek, atau proses yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 4 Yogyakarta.

Tempat penelitian di laksanakan di SMKN 4 Yogyakarta yang beralamat di Jl. Sidikan 60, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus penelitian ini untuk menggambarkan dan mendeskripsikan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS pada SMKN 4 Yogyakarta. Adapun waktu penelitian ini direncanakan selama 2 bulan dimulai pada bulan Maret 2026 sampai dengan April 2026.

Dalam penelitian, terdapat narasumber dan informan ahli yang mempunyai peran penting dalam proses pengumpulan data. Narasumber yaitu satu atau lebih orang yang berasal dari studi kasus yang sedang diteliti dan nantinya akan diwawancara atau diminta untuk meninjau laporan draf studi kasus. Sebagai subjek penelitian, narasumber diharapkan menjadi sumber informasi yang mampu memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan akurat.

Jumlah narasumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan oleh penulis. Narasumber tersebut dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1. Daftar Narasumber

Narasumber	Nama	Jabatan
1	Dra. Nurlatifah Hidayati, M.Hum	Kepala Sekolah
2	Hermin Sulistiyowati, SE	Bendahara BOS
3	Margiyanti, SE	Kepala Tata Usaha
4	Sri Puji Rahayu	Wali Murid

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Wawancara: Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur di mana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan wawancara yang akan ditanyakan kepada narasumber penelitian. 2). Teknik Observasi Langsung: hasil dari observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata pada peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. 3). Teknik dokumentasi: Selain melalui teknik wawancara mendalam dan teknik observasi langsung, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat dan sebagainya yang dapat diambil melalui gambar atau foto pada saat penelitian berlangsung.

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang berkaitan dengan penelitian. Data yang didapatkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 1). Data primer: sumber data berasal dari informasi berupa dokumen-dokumen dan wawancara yang terjadi di SMKN 4 Yogyakarta. 2). Data Sekunder: data sekunder yang didapat diperoleh dari jurnal-jurnal, beberapa buku, serta artikel dari internet yang memuat informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana BOS.

Pengujian Kualitas Data: 1). Metode triangulasi sumber data; Triangulasi sumber data adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2018). Metode triangulasi teknik pengumpulan data: Data penelitian diperoleh dengan melakukan teknik wawancara secara mendalam, teknik observasi secara langsung, serta teknik dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Teknik analisis data kualitatif menggunakan model analisis dari Milles dan Huberman yang terdiri dari empat unsur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Kualitas Data

Tabel 2. Hasil Triangulasi Sumber Data

No	Pertanyaan	Narasumber			
		Kepala Sekolah	Bendahara BOS	Kepala Tata Usaha	Wali Murid
1	Akuntabilitas				

a. Bagaimana kegiatan penyusunan laporan keuangan sekolah dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	Penyusunan RKAS sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sesuai pedoman Juknis yang berlaku, dan pemimpin kegiatan membuat rancangan bersama perencanaan sekolah sesuai dengan program yang telah disusun.	Penyusunan laporan keuangan sekolah dalam penggunaan Dana BOS SMK Negeri 4 Yogyakarta secara jujur, transparan dan konsisten dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Arkas) yang telah ditetapkan dan sesuai dengan petunjuk teknis BOS.	Penyusunan RKAS sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan sesuai pedoman Juknis yang berlaku.	Penyusunan laporan keuangan sekolah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
--	--	--	---	---

Berdasarkan hasil wawancara, penyusunan laporan keuangan di SMKN 4 Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas. Hal ini terlihat dari kesamaan jawaban seluruh narasumber yang menyatakan bahwa proses penyusunan laporan mengikuti pedoman teknis (juknis) dan peraturan yang berlaku. Selain itu, laporan juga disusun secara transparan, jujur, serta mengacu pada RKAS sebagai dasar perencanaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan sudah berjalan dengan baik

Tabel 3. Hasil Triangulasi Sumber Data

b. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	Pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS diantaranya Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Bendahara BOS, <i>toolman</i> di jurusan, Tim Pengembang Sekolah, dan Komite Sekolah.	Pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS diantaranya Kepala Sekolah sebagai Pengguna Anggaran Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Ketua Jurusan yang memiliki kegiatan dan program sekolah, Komite sekolah,	Pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS diantaranya Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, Bendahara BOS, Tim Pengembang Sekolah, Komite Sekolah,	Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Guru, dan Wali Murid.
--	---	---	--	--

			dan masyarakat sebagai pengawas penggunaan Dana BOS.	Petugas Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Perpustakaan, Sekretaris Jurusan, Tim Pokja, Wakil Kepala Sekolah, dan Pengurus Barang.	
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta melibatkan berbagai unsur sekolah dan pihak eksternal. Unsur internal meliputi Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Kepala TU, Wakil Kepala Sekolah, guru, dan tim pendukung lainnya. Selain itu, Komite Sekolah, masyarakat, dan wali murid juga dilibatkan sebagai bentuk pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS dilakukan secara partisipatif dan melibatkan banyak pihak.

Tabel 4. Hasil Triangulasi Sumber Data

c. Penggunaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta dipergunakan untuk apa saja?	Penggunaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta dipergunakan untuk operasional sekolah seperti bahan praktik siswa, alat praktik siswa, pengadaan buku, pemeliharaan peralatan dan mesin, pembelian komputer, peningkatan kompetensi guru, uji kompetensi siswa, kegiatan ekstrakurikuler, lomba keahlian siswa, dan alat tulis kantor.	Penggunaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta dipergunakan untuk membiayai Standar Pendidikan Nasional yang meliputi standar isi, standar proses, dan standar kependidikan. Contohnya membiayai workshop tenaga pendik dan tenaga kependidikan. Standar Sarpras untuk belanja modal computer, laptop, jaringan internet. Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian untuk pendidikan karakter siswa dan kemah bakti.	Penggunaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta dipergunakan untuk operasional sekolah seperti pembelian bahan praktik siswa, pengadaan buku, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung kelas, peningkatan kompetensi guru dan murid, pembelian alat tulis kantor, dan kegiatan siswa.	Penggunaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta dipergunakan untuk pembelian bahan praktik siswa, kegiatan siswa seperti <i>beauty class</i> dan <i>table manner</i> , kegiatan guru tamu, dan pembelian alat tulis kantor.
--	--	--	---	--

Berdasarkan hasil wawancara, Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah seperti bahan praktik siswa, alat praktik, pengadaan buku, pemeliharaan sarana prasarana, pembelian komputer, alat tulis kantor, peningkatan kompetensi guru, kegiatan siswa, ekstrakurikuler, serta uji kompetensi siswa. Penggunaan dana juga diarahkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, Dana BOS telah dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan peningkatan mutu sekolah.

Tabel 5. Hasil Triangulasi Sumber Data

d. Apakah penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan pedoman dan kebutuhan SMKN 4 Yogyakarta?	Ya, penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan pedoman (Juknis) dan kebutuhan yang sudah ditertuang pada RKAS dan disusun menggunakan analisis kebutuhan.	Ya, penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan pedoman (Juknis) dan kebutuhan sekolah.	Ya, penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan pedoman (Juknis) dan kebutuhan disusun berdasarkan prioritas dan berbasis data.	Penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan pedoman (Juknis) dan kebutuhan sekolah.
--	--	---	---	---

Seluruh narasumber menyatakan bahwa penggunaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta telah sesuai dengan pedoman atau juknis yang berlaku serta kebutuhan sekolah. Penggunaan dana juga disusun berdasarkan RKAS, analisis kebutuhan, prioritas kegiatan, dan berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana BOS telah direncanakan secara sistematis dan sesuai ketentuan.

Tabel 6. Hasil Triangulasi Sumber Data

e. Bagaimana pengarsipan dan pelaporan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta?	Bendahara BOS membuat SPJ sesuai dengan bukti pengeluaran, membuat laporan, dan mengarsipkannya sesuai urutan laporan SPJ.	Untuk pengarsipan dan pelaporan Dana BOS sudah disusun dan dilaporkan secara <i>periodic</i> perbulan dengan menggunakan aplikasi Arkas.	Bendahara BOS membuat laporan keuangan berbasis aplikasi dengan menggunakan Arkas. Arkas diinput setiap ada transaksi dan ditutup tiap akhir bulan. Arsip tersusun rapi sesuai BKU perbulan.	Untuk pengarsipan dan pelaporan Dana BOS sudah disusun dan dilaporkan secara rutin tiap bulan.
---	--	--	--	--

Berdasarkan hasil wawancara, pengarsipan, dan pelaporan Dana BOS dilakukan secara tertib dan rutin setiap bulan. Bendahara BOS menyusun SPJ berdasarkan bukti pengeluaran, melakukan input transaksi melalui aplikasi Arkas,

serta menutup laporan pada akhir bulan. Arsip disusun rapi sesuai Buku Kas Umum (BKU). Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi Dana BOS telah berjalan dengan baik dan teratur.

Tabel 7. Hasil Triangulasi Sumber Data

2	Transparansi				
a. Bagaimana kegiatan penyusunan laporan keuangan sekolah dalam penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	Penyusunan laporan keuangan sekolah sudah dilakukan dengan transparansi dengan menggunakan aplikasi Arkas untuk penyusunan laporan dan monitoring realisasi anggaran.	Penyusunan laporan keuangan sekolah dengan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta sudah dilakukan secara transparan secara rutin setiap bulannya dengan menggunakan aplikasi Arkas untuk memudahkan dan kecepatan dalam penyusunan laporan penggunaan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta dan untuk kelengkapan SPJ Dana BOS sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Pemda DIY.	Penyusunan laporan keuangan sekolah sudah dilakukan dengan transparansi dengan menggunakan aplikasi Arkas untuk penganggaran dan penatausahaan laporan keuangan.	Penyusunan laporan keuangan sekolah sudah dilakukan dengan transparansi dengan menggunakan aplikasi Arkas untuk penganggaran dan penatausahaan laporan keuangan.	Sekolah selalu melaporkan penggunaan Dana BOS dan informasi tersebut dapat dilihat di papan pengumuman sekolah.

Penyusunan laporan keuangan sekolah telah dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan aplikasi Arkas. Aplikasi tersebut digunakan untuk penyusunan laporan, penganggaran, serta monitoring realisasi anggaran. Selain itu, laporan disusun secara rutin setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik.

Tabel 8. Hasil Triangulasi Sumber Data

b. Bagaimana cara sekolah	Penggunaan dana BOS	Untuk informasi dan	Penggunaan dana BOS	Sekolah memberikan
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	disampaikan dan dipublikasikan secara rutin di papan pengumuman sekolah dan website sekolah sehingga informasi dapat diakses sewaktu-waktu.	laporan penggunaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta dilakukan dengan publikasi secara rutin melalui website sekolah yang bisa diakses oleh masyarakat umum.	dipublikasikan di papan pengumuman sekolah dan website sekolah sehingga informasi mudah didapatkan dan sebagai monitoring penggunaan Dana BOS.	informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta melalui papan pengumuman sekolah.
--	---	--	--	--

Sekolah memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan website sekolah. Informasi penggunaan Dana BOS dipublikasikan secara rutin sehingga masyarakat dapat mengaksesnya sewaktu-waktu. Langkah ini menunjukkan adanya keterbukaan informasi kepada publik.

Tabel 9. Hasil Triangulasi Sumber Data

c. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat dalam memonitoring/ evaluasi Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	Tidak ada <i>complain</i> dari masyarakat menunjukkan bahwa penggunaan Dana BOS sudah dilaporkan secara transparan dan dapat dimonitoring sewaktu-waktu lewat website dan papan pengumuman sekolah.	Kepercayaan masyarakat tinggi atas penggunaan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta.	Tidak ada permasalahan dalam penggunaan Dana BOS karena sesuai dengan pedoman dan ada pelaporan setiap <i>periodic</i> kepada pengurus komite sekolah.	Ya, percaya. Sekolah sudah melaporkan penggunaan Dana BOS dengan rutin dan transparan.
--	---	---	--	--

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari tidak adanya keluhan masyarakat, adanya pelaporan rutin kepada komite sekolah, serta keterbukaan informasi melalui website dan papan pengumuman. Dengan demikian, transparansi yang dilakukan sekolah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Tabel 10. Hasil Triangulasi Sumber Data

d. Apa alasan dan manfaat sekolah menerapkan transparansi	Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas	Untuk memastikan pengelolaan dan penggunaan	Transparansi dan akuntabilitas merupakan bukti kepatuhan terhadap	Manfaat sekolah menerapkan transparansi dan
---	--	---	---	---

	dan akuntabilitas Dana BOS?	merupakan bukti kepatuhan terhadap peraturan, mencegah penyalahgunaan anggaran, manajemen berbasis sekolah, dan memastikan penggunaan Dana BOS tepat sasaran.	Dana BOS sudah sesuai dengan juknis BOS. Untuk menghindari penyelewengan dan korupsi dari Dana BOS dan meningkatkan rasa percaya masyarakat/orang tua wali siswa terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Dana BOS digunakan sesuai kebutuhan operasional dan memprioritaskan kegiatan sekolah.	peraturan, mencegah penyalahgunaan anggaran, manajemen berbasis sekolah, dan memastikan penggunaan Dana BOS tepat sasaran.	akuntabilitas Dana BOS agar pengelolaan Dana BOS sudah dilakukan sesuai dengan juknis yang berlaku dan masyarakat dapat ikut memonitoring penggunaan Dana BOS.
--	-----------------------------	---	---	--	--

Penerapan transparansi dan akuntabilitas bertujuan untuk mematuhi peraturan, mencegah penyalahgunaan anggaran, memastikan dana tepat sasaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, prinsip ini mendukung manajemen berbasis sekolah dan pengawasan bersama terhadap penggunaan Dana BOS.

Tabel 11. Hasil Triangulasi Sumber Data

e.Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	Juknis yang berubah pada pertengahan tahun sehingga sekolah harus menyesuaikan kegiatan. Contohnya: Juknis untuk pengadaan anggaran buku minimal 10% dari pagu dan harus dinilai Kementrian,	Keterlambatan pencairan Dana BOS termin 2 pada tahun 2025 sehingga kegiatan tidak tepat waktu dan proses belanja di aplikasi pengadaan	Juknis yang berubah saat periode berjalan, sehingga sekolah harus menata ulang anggaran dan berdasarkan skala	Hambatannya adalah keterlambatan penerimaan Dana BOS dari pusat pada termin 2 Tahun 2025 sehingga kegiatan menjadi mundur dan tidak tepat ankas.
---	--	--	---	--

	sehingga harus menata ulang prioritas kegiatan. Pengadaan buku sebanyak 10 % juga sulit diterapkan karena buku yang dibutuhkan sekolah kebanyakan belum dinilai. Itu menjadi salah satu tantangan kami bahwa anggaran harus disusun sesuai dengan aturan dan buku yang dibeli tetap bermanfaat untuk murid. Keterlambatan penyaluran dana termin 2 pada tahun 2025, sehingga kegiatan siswa juga ikut tertunda.	barang dan jasa (Siplah) tertunda.	prioritas kebutuhan. Contohnya: Juknis untuk tahun 2025 baru terbit pada pertengahan tahun yang mengharuskan untuk pengadaan anggaran buku minimal 10% dari pagu dan harus dinilai Kementerian, Keterlambatan penyaluran dana termin 2 pada tahun 2025 sehingga ada beberapa kegiatan siswa yang tertunda.
--	---	------------------------------------	--

Hambatan utama yang dihadapi sekolah adalah perubahan juknis pada pertengahan tahun dan keterlambatan pencairan Dana BOS termin 2 tahun 2025. Perubahan juknis menyebabkan sekolah harus menyesuaikan kembali anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan sementara keterlambatan pencairan dana berdampak pada tertundanya kegiatan siswa dan proses pengadaan barang/jasa. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran pengelolaan Dana BOS.

Tabel 12. Hasil Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

No	Pertanyaan	Wawancara Mendalam	Observasi Langsung	Dokumentasi
1	Akuntabilitas			
	a. Bagaimana kegiatan penyusunan laporan	Narasumber menyatakan	Terlihat penyusunan	Dokumen RKAS, laporan

	keuangan sekolah dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas, mengacu pada juknis, serta disusun berdasarkan RKAS secara jujur, transparan, dan konsisten.	laporan menggunakan aplikasi Arkas dan dilakukan secara sistematis serta berkala.	keuangan, dan SPJ menunjukkan kesesuaian dengan juknis dan prinsip akuntabilitas.
	b.Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	Narasumber menyebutkan pihak yang terlibat antara lain kepala sekolah, bendahara BOS, kepala TU, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan tim pengembang sekolah.	Terlihat adanya pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan Dana BOS di sekolah.	Struktur organisasi dan SK tim BOS menunjukkan keterlibatan berbagai pihak.
	c.Penggunaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta dipergunakan untuk apa saja?	Narasumber menjelaskan Dana BOS digunakan untuk operasional sekolah seperti pembelian bahan praktik, pengadaan buku, kegiatan siswa, pemeliharaan sarana, dan peningkatan kompetensi guru.	Terlihat fasilitas dan kegiatan sekolah berjalan dengan dukungan Dana BOS.	Bukti transaksi dan laporan penggunaan dana menunjukkan penggunaan sesuai kebutuhan sekolah.
	d.Apakah penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan pedoman dan kebutuhan SMKN 4 Yogyakarta?	Narasumber menyatakan penggunaan Dana BOS sudah sesuai dengan juknis dan kebutuhan sekolah berdasarkan prioritas.	Tidak ditemukan penyimpangan, kegiatan berjalan sesuai perencanaan.	Dokumen RKAS dan laporan realisasi anggaran sesuai dengan pedoman.
	e.Bagaimana pengarsipan dan pelaporan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta?	Narasumber menyampaikan pelaporan dilakukan secara rutin menggunakan aplikasi ARKAS dan diarsipkan berdasarkan SPJ.	Terlihat arsip tersusun rapi dan pelaporan dilakukan setiap periode.	Dokumen BKU, laporan bulanan, dan SPJ tersimpan dengan baik.

2	Transparansi			
	a. Bagaimana kegiatan penyusunan laporan keuangan sekolah dalam penerapan prinsip transparansi dalam penggunaan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	Narasumber menyatakan laporan keuangan disusun secara transparan dan menggunakan aplikasi Arkas untuk memudahkan monitoring.	Terlihat adanya akses informasi laporan melalui media sekolah.	Dokumentasi laporan dan publikasi menunjukkan transparansi.
	b. Bagaimana cara sekolah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	Narasumber menyampaikan informasi dipublikasikan melalui papan pengumuman dan website sekolah secara rutin.	Terlihat informasi penggunaan dana ditampilkan di lingkungan sekolah.	Dokumentasi publikasi laporan menunjukkan keterbukaan informasi.
	c. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat dalam memonitoring/ evaluasi Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	Narasumber menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat tinggi karena tidak ada keluhan dan laporan disampaikan secara transparan.	Tidak terlihat adanya <i>komplain</i> dari masyarakat.	Dokumentasi laporan dan publikasi mendukung tingkat kepercayaan masyarakat.
	d. Apa alasan dan manfaat sekolah menerapkan transparansi dan akuntabilitas Dana BOS?	Narasumber menyatakan untuk mencegah penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memastikan penggunaan tepat sasaran.	Terlihat pengelolaan dana lebih tertib dan sesuai aturan.	Dokumen kebijakan dan laporan menunjukkan kepatuhan terhadap juknis.
	e. Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan Dana BOS SMKN 4 Yogyakarta?	Narasumber menyebutkan hambatan berupa perubahan juknis dan keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada kegiatan sekolah.	Terlihat beberapa kegiatan mengalami penyesuaian jadwal.	Dokumen laporan menunjukkan adanya keterlambatan realisasi kegiatan akibat kendala tersebut.

Pembahasan

Mekanisme Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMKN 4 Yogyakarta

Anggaran Dana BOS merupakan anggaran belanja sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, dimana anggaran pendidikan bersumber dari anggaran negara yang harus memprioritaskan anggaran pendidikan. Dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui Dana BOS yakni berbentuk dana yang langsung masuk ke rekening sekolah. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Pencairan Dana BOS Kemdikbud RI memaparkan bahwa aturan Penyaluran Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) Reguler akan dilakukan pada tahun 2025 dalam dua tahapan. Tahap 1 akan disalurkan sebesar 50% pada awal Januari, selanjutnya Tahap 2 yaitu sebesar 50% akan disalurkan paling cepat bulan Juli melalui rekening satuan Pendidikan. Penyaluran dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2025 di SMKN 4 Yogyakarta sebesar Rp 3.183.020.000. Prosedur pengelolaan anggaran sebagai berikut:

1. Perancangan: Dalam pembuatan perencanaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta dimulai dengan pembuatan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai rencana yang dirumuskan oleh satuan pendidikan sesuai wewenang yang ada. Dalam perencanaan keuangan sekolah membahas seluruh kegiatan dan kebutuhan untuk meningkatkan mutu siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan mendukung kebutuhan operasional sekolah. RKAS ini disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah sekaligus untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun pelajaran.
2. Pelaksanaan: Dalam aspek pelaksanaan dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS yang terdiri dari: penerimaan dana, besaran alokasi dana, penyaluran dana, penggunaan dana.
3. Pengelolaan dana: Pengelolaan Dana BOS dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan SMKN 4 Yogyakarta yang bertugas dalam mengisi data Satuan Pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan, melakukan verifikasi, dan validasi isian data Satuan Pendidikan yang masuk dalam Dapodik, menyusun rencana kegiatan, dan anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Dana BOS, melakukan konfirmasi penerimaan dana BOS yang sudah diterima melalui sistem aplikasi penyaluran Dana BOS yang disediakan oleh Kementerian, melakukan penatausahaan Dana BOS, menggunakan Dana BOS sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan, melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOS sesuai peraturan Pengadaan Barang dan Jasa, menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS, dan memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS yang dapat dibuktikan dengan laporan realisasi RKAS.

4. Pertanggung jawaban: Pertanggungjawaban penerima Dana BOS membuat pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban lembaga pengelola keuangan. Pembukuan yang dilakukan oleh sekolah yaitu membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang merupakan rencana penggunaan Dana BOS.

Manfaat Akuntabilitas dan Transparansi bagi Efisiensi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

1. Peran Akuntabilitas terhadap Efisiensi Penggunaan Dana BOS dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penggunaan biaya bantuan operasional sekolah di SMKN 4 Yogyakarta sudah berjalan secara efisien, dilihat dari penggunaan yang telah terealisasi. Penggunaannya efisien untuk kebutuhan siswa di sekolah tersebut, maka penggunaan Dana BOS periode satu tahun pembelajaran tahun 2025 SMKN 4 Yogyakarta sebesar Rp 1.670.000 persiswa dan dianggap telah terealisasi 100% secara efisien dan telah meningkatkan kualitas pendidikan di SMKN 4 Yogyakarta. Maka dapat dikatakan telah mencukupi kebutuhan siswa selama proses pembelajaran di sekolah

2. Peran Transparansi terhadap Efisiensi Penggunaan Dana BOS dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

SMKN 4 Yogyakarta membangun kepercayaan dengan memberikan keterbukaan informasi dalam perencanaan kegiatan siswa dalam perumusan RKAS melibatkan seluruh komponen sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa, pembuatan RKAS di SMKN 4 Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan adanya tanggung jawab dari setiap penanggungjawab kegiatan yang telah direncanakan dan didalam pembuatannya melibatkan seluruh kebutuhan sekolah yang disusun oleh guru dan karyawan SMKN 4 Yogyakarta. Dengan demikian, kegiatan perencanaan dilakukan dengan keterbukaan dengan selalu melaporkan pengeluaran yang ada disetiap bulannya.

3. Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Monitoring dan Mengevaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Monitoring dan Mengevaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dalam pengelolaan Dana BOS Reguler kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah. Tim BOS sekolah terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota. Anggota terdiri satu orang unsur guru, satu orang unsur komite sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik.

Berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah, bendahara BOS adalah tenaga kependidikan non guru atau tenaga kependidikan guru yang diangkat dengan SK Kepala Daerah

sesuai dengan kewenangannya atas usulan dari Kepala SKPD. Khusus untuk anggota tim BOS terdiri dari satu orang yang berasal dari unsur guru, satu orang yang berasal dari unsur kepala TU dan satu orang yang berasal dari unsur orang tua/ wali peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa SMKN 4 Yogyakarta sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Daerah, yaitu melibatkan bendahara BOS, guru, dan kepala TU serta orangtua/ wali murid di luar komite sekolah. Tim BOS sekolah sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti: (1) mengisi data sekolah secara lengkap dan valid ke Dapodik serta bertanggungjawab terhadap hasil isian data sekolah (2) menyusun RKAS dan memasukan data pada sistem dari pemerintah (3) memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS, (4) serta menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana pada papan anggaran yang tersedia.

Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMKN 4 Yogyakarta

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana BOS, SMKN 4 Yogyakarta menghadapi beberapa hambatan yang berasal dari faktor regulasi. Salah satu kendala utama adalah adanya perubahan petunjuk teknis (juknis) yang terjadi di tengah periode berjalan. Perubahan tersebut menuntut pihak sekolah untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap perencanaan anggaran yang telah disusun dalam RKAS. Kondisi ini tidak hanya memerlukan waktu dan tenaga tambahan, tetapi juga berpotensi mengganggu konsistensi program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Selain itu, keterlambatan penyaluran Dana BOS juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Keterlambatan pencairan dana, khususnya pada termin tertentu berdampak pada tertundanya pelaksanaan berbagai kegiatan sekolah. Hal ini menyebabkan beberapa program tidak dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dampak lainnya adalah terganggunya efektivitas penggunaan anggaran karena sekolah harus melakukan penyesuaian ulang terhadap prioritas kegiatan yang dianggap paling mendesak.

Di sisi lain, tantangan juga muncul dalam upaya mempertahankan transparansi dan akuntabilitas secara konsisten. Meskipun sistem pelaporan sudah menggunakan aplikasi seperti Arkas tetap diperlukan ketelitian dan kedisiplinan dalam pencatatan serta pelaporan setiap transaksi keuangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami perubahan sistem dan regulasi juga dapat menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar pihak agar pengelolaan Dana BOS tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 4 Yogyakarta, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pengawasan, Transparansi dalam pengelolaan Dana BOS telah diterapkan melalui penyediaan informasi kepada publik melalui papan pengumuman dan media lainnya, Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS tergolong tinggi karena tidak adanya keluhan signifikan, Penggunaan Dana BOS telah sesuai dengan kebutuhan sekolah dan ketentuan yang berlaku, Masih terdapat hambatan seperti perubahan juknis dan keterlambatan pencairan dana.

Adapun saran penelitian yaitu : 1). Sekolah diharapkan meningkatkan kualitas pengelolaan Dana BOS dan koordinasi antarpihak. 2). Meningkatkan kompetensi SDM dalam penggunaan Arkas dan pemahaman regulasi. 3). Pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dan meminimalisir perubahan juknis. 4). Pemerintah memastikan ketepatan waktu penyaluran Dana BOS. 5). Peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian. Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang disebabkan karena adanya keterbatasan akses data serta waktu pengamatan, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir secara umum

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, K., & Salim, A. (2022). Peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era globalisasi. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5871–5879. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3258>
- Fauziah, N., & Rahmat, A. (2021). Implementasi kebijakan bantuan pendidikan dalam menunjang mutu pendidikan nasional. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 133–142. <https://doi.org/10.17509/jap.v28i2.40761>
- Handayani, S., & Kurniawan, D. (2023). Sumber pembiayaan pendidikan dan efektivitas pengelolaan dana sekolah. *Jurnal Basicedu*, 7(2), 1455–1463. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i2.5142>
- Hidayat, M., & Fauzi, A. (2023). Implementasi pengelolaan dana BOS dalam mendukung standar nasional pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 14(1), 66–75. <https://doi.org/10.23887/japi.v14i1.59872>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9x7sy>
- Kusuma, A. P., & Hartono, B. (2022). Transparansi pengelolaan keuangan sekolah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11234–11241. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4217>
- Lestari, N., & Firmansyah, D. (2023). Implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pada manajemen keuangan sekolah. *Jurnal Pendidikan*

-
- Administrasi Perkantoran*, 11(1), 55–64.
<https://doi.org/10.26740/jpap.v11n1.p55-64>
- Maulina, R., & Setiawan, A. (2021). Akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 5(3), 210–218.
<https://doi.org/10.17977/um025v5i32021p210>
- Prasetyo, M. A. M., & Munastiwi, E. (2021). Manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1815–1823. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.694>
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi manusia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 7911–7915. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9498>
- Rahmawati, E., & Supriyanto, A. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan di sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(1), 45–54.
<https://doi.org/10.17509/jap.v29i1.42615>
- Rustiningrum, R. (2023). Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 18(1), 54–63.
<https://doi.org/10.23917/jmp.v18i1.22145>
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2022). Peran pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 4211–4218.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7310>
- Suhardi, D., & Nurhayati, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam meningkatkan tata kelola lembaga pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 16(2), 120–129. <https://doi.org/10.23917/jmp.v16i2.13245>
- Suriansyah, A., & Aslamiah, A. (2021). Pendidikan sebagai proses pengembangan kualitas manusia. *Jurnal Paradigma*, 16(2), 85–94.
<https://doi.org/10.20527/paradigma.v16i2.11154>
- Widodo, T., & Ramadhani, P. R. (2022). Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah berbasis kebutuhan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 17(2), 101–110. <https://doi.org/10.23917/jmp.v17i2.18754>
- Yuliana, E., & Hadi, S. (2022). Analisis dana Bantuan Operasional Pendidikan daerah terhadap keberlangsungan pendidikan sekolah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, 3(1), 66–75. <https://doi.org/10.23887/jpei.v3i1.50231>